

Partisipasi dan Demokratisasi Informasi Era Society 5.0 di Indonesia

Annisarizki¹, Sigit Surahman²

¹Universitas Serang Raya, Jl. Raya Serang-Cilegon Km 5 Serang-Banten,

²Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Utara Jawa Barat

e-mail: annisarizzkii@gmail.com

Abstrak

Era Society 5.0 mengusung integrasi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), dan Big Data untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Artikel ini mengeksplorasi bagaimana teknologi ini dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi publik dan mendemokratisasikan informasi. Fokus penelitian adalah pada dampak teknologi terhadap aksesibilitas informasi, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan tantangan yang muncul terkait privasi dan etika. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis konten. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti jurnal akademik, laporan pemerintah, dan artikel berita yang relevan dengan topik partisipasi dan demokratisasi informasi di era Society 5.0.

Kata kunci: Ai, Big Data, Demokratisasi, Privasi, Teknologi

PENDAHULUAN

Society 5.0 adalah konsep futuristik yang diperkenalkan oleh pemerintah Jepang untuk menjawab berbagai tantangan sosial melalui integrasi yang harmonis antara dunia fisik dan digital. Konsep ini pertama kali muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang kompleks seperti penuaan populasi, perubahan iklim, dan ketidaksetaraan sosial dengan memanfaatkan teknologi canggih secara maksimal. Teknologi-teknologi ini, termasuk kecerdasan buatan (AI), *Internet of Things* (IoT), dan Big Data, menawarkan potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Nakanishi, 2019). Mereka dapat memfasilitasi partisipasi yang lebih luas dalam pengambilan keputusan dan memastikan akses yang lebih adil terhadap informasi dan sumber daya yang diperlukan. Partisipasi merujuk pada keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam berbagai kegiatan, proses, atau keputusan yang mempengaruhi mereka atau lingkungan di sekitar mereka. Ini dapat mencakup berbagai bentuk, mulai dari partisipasi dalam proses politik seperti pemilihan umum, hingga partisipasi dalam pembangunan masyarakat seperti program pengembangan lokal (Rosenstone & Hansen, 2023).

Namun, meskipun potensi manfaatnya sangat besar, penerapan teknologi ini juga menimbulkan pertanyaan kritis mengenai cara mereka dapat dimanfaatkan secara inklusif dan etis. Isu-isu seperti privasi, keamanan data, dan potensi eksklusi digital menjadi perhatian utama. Bagaimana teknologi ini dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi adalah tantangan yang harus diatasi untuk memastikan bahwa manfaat dari *Society 5.0* dapat dirasakan oleh semua orang, bukan hanya oleh mereka yang sudah memiliki akses ke teknologi canggih. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah secara drastis cara masyarakat mengakses dan mendistribusikan informasi. Di era *Society 5.0*, perubahan ini diperluas dengan pengenalan teknologi seperti AI dan IoT yang memungkinkan pengolahan data dalam skala besar dan *real-time*. AI, misalnya, dapat digunakan untuk menganalisis data dalam jumlah besar untuk menghasilkan wawasan yang dapat digunakan untuk membuat keputusan

yang lebih baik dan lebih cepat. Sementara itu, IoT menghubungkan perangkat fisik ke internet, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan bertukar data secara otomatis. Kombinasi dari teknologi ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya cerdas dalam pemanfaatan teknologi, tetapi juga inklusif dan berkeadilan dalam distribusi manfaatnya.

Society 5.0 berupaya untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari, dari kesehatan dan pendidikan hingga transportasi dan energi. Dengan demikian, konsep ini tidak hanya tentang inovasi teknologi, tetapi juga tentang transformasi sosial dan ekonomi yang lebih luas. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang mendukung inklusi digital dan melindungi hak-hak individu (Surahman, 2024).

Melalui pendekatan ini, *Society 5.0* berharap dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap individu, tanpa memandang latar belakang, status ekonomi, atau lokasi geografis, untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan digital. Ini berarti bahwa teknologi harus diakses oleh semua orang, bukan hanya oleh mereka yang sudah memiliki keuntungan ekonomi atau pendidikan yang memadai. Dalam konteks ini, *Society 5.0* menekankan pentingnya inklusi digital, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan teknologi canggih seperti internet, perangkat pintar, dan layanan digital untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Misalnya, di sektor pendidikan, teknologi digital dapat menyediakan akses ke sumber daya pembelajaran yang berkualitas tinggi untuk anak-anak di daerah terpencil, yang sebelumnya sulit dijangkau oleh sistem pendidikan tradisional (Fukuyama, 2018).

Selain itu, *Society 5.0* bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat dari kemajuan teknologi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini termasuk peningkatan layanan kesehatan melalui *telemedicine* dan perangkat medis pintar yang dapat memantau kondisi pasien secara real-time, memungkinkan perawatan yang lebih cepat dan efektif, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah yang kurang terlayani (Nakano, 2019). Di sektor tenaga kerja, *Society 5.0* mendukung penggunaan AI dan robotika untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan kerja, sambil tetap menciptakan peluang baru bagi pekerja melalui pendidikan dan pelatihan ulang (Yamaguchi, 2020). Dengan demikian, *Society 5.0* bukan hanya tentang penerapan teknologi tinggi untuk menciptakan solusi cerdas, tetapi juga tentang membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Ini berarti bahwa kebijakan dan inisiatif harus dirancang untuk mengatasi kesenjangan digital dan memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang mendukung akses universal terhadap teknologi, melindungi hak-hak privasi individu, dan mendorong partisipasi aktif dari semua anggota masyarakat (Morikawa, 2020).

Sedangkan demokratisasi adalah proses atau upaya untuk meningkatkan partisipasi politik, memperluas hak-hak sipil, dan memperbaiki sistem politik agar lebih responsif terhadap keinginan dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Ini sering kali melibatkan pengembangan lembaga-lembaga demokratis, perlindungan hak asasi manusia, penguatan ruang sipil, dan promosi nilai-nilai demokratis. Proses demokratisasi dapat melibatkan berbagai langkah, termasuk pengadopsian undang-undang yang mendukung kebebasan sipil, pemilihan umum yang bebas dan adil, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pembuatan keputusan politik. Demokratisasi bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih terbuka, inklusif, dan akuntabel, di mana kekuasaan dipertanggungjawabkan kepada rakyat (Diamond, 2023).

Pada intinya, *Society 5.0* adalah visi tentang masa depan di mana teknologi berfungsi sebagai

enabler bagi semua orang, bukan hanya segelintir elit. Ini adalah tentang membangun masyarakat yang lebih baik, di mana inovasi teknologi membantu mengatasi tantangan sosial dan menciptakan peluang baru bagi semua individu, tanpa kecuali. Oleh karena itu, *Society 5.0* tidak hanya berfokus pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada penciptaan ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan yang memberdayakan setiap orang untuk mencapai potensi penuh mereka (Miyamoto, 2019)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan metode yang sering digunakan untuk memahami fenomena sosial dan budaya secara mendalam. Dalam penelitian ini, metode studi literatur dan analisis konten digunakan untuk menggali informasi dan wawasan yang relevan. Studi literatur melibatkan penelusuran dan analisis sumber-sumber tertulis yang ada, yang mencakup berbagai teori, temuan penelitian, dan argumen yang telah dipublikasikan sebelumnya.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber yang kredibel dan relevan dengan topik partisipasi dan demokratisasi informasi di era *Society 5.0*. Sumber-sumber ini meliputi jurnal akademik yang memberikan landasan teoritis dan empiris dari penelitian sebelumnya, laporan pemerintah yang menawarkan pandangan resmi dan kebijakan terkait dengan penerapan *Society 5.0*, serta artikel berita yang memberikan konteks dan perkembangan terbaru di lasagna (Bryman, 2019).

Dengan menggabungkan berbagai jenis sumber data ini, penelitian ini dapat menawarkan pandangan yang komprehensif dan mendalam mengenai isu partisipasi dan demokratisasi informasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul dalam penerapan teknologi di era *Society 5.0*, serta mengevaluasi dampaknya terhadap masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pemahaman akademis tetapi juga menawarkan wawasan praktis yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan, praktisi, dan masyarakat luas untuk mengoptimalkan manfaat teknologi digital dalam konteks sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan (Yin, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknologi dan Aksesibilitas Informasi

Teknologi di era *Society 5.0* memungkinkan akses yang lebih luas terhadap informasi melalui berbagai perangkat yang terhubung ke internet, seperti *smartphone*, komputer, dan perangkat IoT (*Internet of Things*). Dengan teknologi ini, informasi dapat diakses secara real-time, memungkinkan individu untuk mendapatkan data dan informasi yang mereka butuhkan kapan saja dan di mana saja. Misalnya, melalui aplikasi pendidikan online, siswa dapat belajar dari rumah, dan melalui platform kesehatan digital, pasien dapat berkonsultasi dengan dokter tanpa harus pergi ke klinik. Kemajuan ini telah membuka pintu bagi banyak orang untuk mengakses layanan dan informasi yang sebelumnya sulit dijangkau.

Namun, meskipun potensi manfaatnya sangat besar, masih ada kesenjangan digital yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat memanfaatkan teknologi ini. Kesenjangan digital merujuk pada perbedaan antara individu yang memiliki akses dan keterampilan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan mereka yang tidak. Kesenjangan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan ekonomi, kurangnya infrastruktur teknologi, dan rendahnya literasi digital. Misalnya, di beberapa daerah

pedesaan atau terpencil, akses ke internet mungkin masih terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali, membuat penduduk di daerah tersebut tidak dapat menikmati manfaat dari teknologi digital (Forum, 2020).

Untuk mengatasi kesenjangan ini, strategi peningkatan literasi digital menjadi sangat penting. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan untuk menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga pemahaman tentang bagaimana mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif dan etis. Program pelatihan dan edukasi dapat diimplementasikan untuk membantu masyarakat memahami dan memanfaatkan teknologi digital. Misalnya, kursus-kursus online gratis atau murah yang mengajarkan keterampilan dasar komputer dan internet dapat sangat membantu. Selain itu, inisiatif pemerintah dan organisasi non-pemerintah (NGO) dapat berperan penting dalam menyediakan akses dan pelatihan teknologi kepada kelompok yang kurang terlayani.

Selain itu, pembangunan infrastruktur teknologi yang merata juga harus menjadi prioritas. Pemerintah dan sektor swasta perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa infrastruktur internet yang memadai tersedia di seluruh wilayah, termasuk di daerah terpencil. Kebijakan yang mendukung pengurangan biaya akses internet dan perangkat teknologi juga dapat membantu meningkatkan aksesibilitas. Meskipun teknologi di era *Society 5.0* memiliki potensi besar untuk meningkatkan akses informasi, tantangan kesenjangan digital harus diatasi melalui strategi peningkatan literasi digital dan pembangunan infrastruktur yang inklusif. Hanya dengan begitu, semua lapisan masyarakat dapat benar-benar memanfaatkan manfaat dari kemajuan teknologi ini dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan digital (Surahman, 2024)

Indonesia, dengan populasi lebih dari 270 juta orang dan ribuan pulau yang tersebar luas, menghadapi tantangan unik dalam hal teknologi dan aksesibilitas informasi. Di era *Society 5.0*, yang mengintegrasikan dunia fisik dan digital melalui teknologi canggih seperti *Internet of Things* (IoT) dan kecerdasan buatan (AI), potensi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses informasi yang lebih baik sangat besar.

Teknologi dan aksesibilitas informasi di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan, tetapi masih ada tantangan besar yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat penuh dari era *Society 5.0*. Inisiatif pemerintah dan kerja sama dengan berbagai pihak merupakan kunci untuk mengatasi kesenjangan digital dan meningkatkan literasi digital di seluruh negeri. Dengan upaya yang berkelanjutan, Indonesia dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan terhubung, di mana informasi dan teknologi dapat diakses oleh semua orang. Dengan demikian artikel ini

Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan

Teknologi seperti *platform* partisipatif *online* memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan, sehingga suara mereka dapat didengar dan dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan. *Platform*-partisipatif ini mencakup berbagai alat digital seperti situs web pemerintah interaktif, aplikasi *mobile*, forum diskusi *online*, dan sistem *e-voting* yang memungkinkan warga untuk memberikan masukan, suara, atau saran secara langsung tentang isu-isu publik. Misalnya, di beberapa kota besar, pemerintah telah mengadopsi platform ini untuk mengundang partisipasi warga dalam perencanaan tata kota, anggaran partisipatif, dan konsultasi kebijakan, yang tidak hanya meningkatkan keterlibatan masyarakat tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan warganya.

Contoh kasus di berbagai negara menunjukkan bahwa teknologi ini dapat secara signifikan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Di Estonia, misalnya, penggunaan

platform e-governance memungkinkan warga untuk melakukan banyak interaksi dengan pemerintah secara online, mulai dari pemungutan suara hingga pengurusan dokumen resmi. Hal ini telah menghasilkan tingkat partisipasi yang tinggi dan kepercayaan publik yang lebih besar terhadap pemerintah karena prosesnya lebih terbuka dan dapat diaudit. Di Brasil, *platform "Participatory Budgeting"* memungkinkan warga untuk memutuskan penggunaan sebagian dari anggaran kota, yang meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana publik dan memastikan bahwa pengeluaran pemerintah mencerminkan kebutuhan dan prioritas masyarakat.

Namun, agar partisipasi yang efektif melalui teknologi ini dapat terwujud, diperlukan infrastruktur teknologi yang memadai. Infrastruktur tersebut mencakup akses internet yang cepat dan stabil, perangkat teknologi yang terjangkau, serta dukungan teknis yang memadai. Tanpa infrastruktur yang kuat, platform online tidak akan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan ekonomi. Selain infrastruktur, kebijakan yang mendukung juga sangat penting. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung inklusi digital, seperti subsidi untuk akses internet, program pelatihan literasi digital, dan inisiatif untuk mengurangi kesenjangan digital (Tanaka, 2020).

Selain itu, keberhasilan partisipasi melalui *platform* digital juga tergantung pada adanya budaya partisipatif dalam masyarakat. Ini berarti masyarakat perlu didorong dan dilatih untuk aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan, serta memahami bagaimana cara menggunakan teknologi untuk berpartisipasi. Pendidikan dan sosialisasi tentang pentingnya partisipasi publik dan cara-cara efektif untuk berkontribusi melalui *platform* digital dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, meskipun teknologi *platform* partisipatif online menawarkan peluang besar untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, keberhasilan implementasinya sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai dan kebijakan yang mendukung. Kombinasi antara teknologi yang canggih, infrastruktur yang kuat, dan kebijakan yang inklusif akan memastikan bahwa semua anggota masyarakat dapat berpartisipasi secara efektif dan mendapatkan manfaat dari keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan publik.

Partisipasi dan demokratisasi informasi di era *Society 5.0* di Indonesia telah menjadi semakin penting dalam upaya membangun masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui penggunaan teknologi, inisiatif *Open Government Data*, partisipasi dalam proyek *Smart City*, penggunaan media sosial, dan program pelatihan literasi digital, Indonesia bergerak menuju masyarakat yang lebih partisipatif dan informasi yang lebih demokratis. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan bahwa masyarakat Indonesia dapat lebih aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan memanfaatkan potensi teknologi untuk kesejahteraan bersama.

Tantangan dan Peluang

Meskipun teknologi menawarkan banyak peluang untuk mendemokratisasikan informasi, terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi dalam mengimplementasikan konsep ini secara efektif di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah masalah misinformasi yang sering kali menyebar luas melalui platform digital. Misinformasi dapat mengganggu pemahaman yang akurat tentang isu-isu penting dan merusak proses demokrasi dengan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pemilihan umum, kebijakan publik, dan isu-isu sosial lainnya. Di samping itu, polarisasi masyarakat juga menjadi masalah serius yang muncul akibat penggunaan teknologi dalam menyebarkan informasi. Terkadang, platform media sosial menjadi tempat di mana pandangan ekstrem dipertegas dan perdebatan menjadi lebih tidak sehat.

Tidak hanya itu, ketergantungan berlebihan pada teknologi juga dapat menjadi tantangan dalam mendemokratisasikan informasi di Indonesia. Ketergantungan yang berlebihan pada teknologi dapat menyebabkan ketidaksetaraan akses informasi antara mereka yang memiliki akses teknologi dan mereka yang tidak. Terutama di daerah-daerah pedesaan atau daerah terpencil, di mana infrastruktur teknologi mungkin belum terlalu berkembang, ketergantungan pada teknologi dapat mengisolasi sebagian masyarakat dari arus informasi utama.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan kompleks yang terkait dengan mendemokratisasikan informasi di Indonesia, diperlukan upaya kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan regulasi yang mendukung dan memfasilitasi proses demokratisasi informasi. Ini termasuk memberlakukan regulasi yang mempromosikan keberagaman informasi, mencegah penyebaran misinformasi, dan menjamin akses yang lebih merata pada teknologi di seluruh negeri. Selain itu, pemerintah juga dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk meningkatkan literasi digital di antara masyarakat dan memperluas akses infrastruktur teknologi, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal.

Sementara itu, sektor swasta dapat turut berkontribusi dalam menanggapi tantangan ini dengan mengambil langkah-langkah konkret. Misalnya, perusahaan teknologi dapat berperan dalam mengembangkan algoritma yang lebih netral dan transparan untuk mengurangi risiko penyebaran konten yang tidak benar atau berbahaya. Selain itu, mereka dapat menyediakan pelatihan dan sumber daya bagi masyarakat untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan produktif. Tetap melalui nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial, sektor swasta dapat menjadi mitra yang efektif dalam memastikan bahwa dampak teknologi terhadap demokratisasi informasi menjadi lebih positif yang dikedepakan.

Di sisi lain, masyarakat sipil memiliki peran kunci dalam membentuk pandangan sosial terkait dengan penggunaan teknologi dan informasi. Mereka dapat berperan dalam meningkatkan literasi digital dan kritis di kalangan masyarakat, sehingga individu memiliki kemampuan untuk memilah-milah informasi yang benar dan mengidentifikasi misinformasi. Selain itu, masyarakat sipil juga dapat mengadvokasi untuk kebijakan yang mendukung demokratisasi informasi dan memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi dalam penggunaan teknologi.

Dengan kolaborasi yang kuat dan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, diharapkan bahwa tantangan-tantangan kompleks yang terkait dengan mendemokratisasikan informasi dapat diatasi secara efektif. Melalui kerja sama yang berkelanjutan, potensi positif dari teknologi dalam memperkuat demokrasi dan partisipasi masyarakat dapat dimanfaatkan sepenuhnya di Indonesia, menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, berpengetahuan, dan terlibat dalam proses pembangunan nasional.

KESIMPULAN

Era *Society* 5.0 membawa peluang besar bagi Indonesia untuk memperluas partisipasi publik dan mendemokratisasikan akses terhadap informasi. Dengan kemajuan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI), *Internet of Things* (IoT), dan *big data analytics*, ada potensi untuk menciptakan transformasi yang signifikan dalam dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Teknologi ini dapat berperan sebagai alat yang memungkinkan partisipasi lebih luas dari berbagai segmen masyarakat, termasuk yang sebelumnya terpinggirkan, dalam proses pembuatan keputusan dan pengelolaan sumber daya.

Namun, untuk mewujudkan potensi positif ini, penting untuk memperhatikan bagaimana

teknologi ini diimplementasikan dan diatur. Tanpa kerangka kerja yang tepat, teknologi yang canggih ini bisa saja meningkatkan kesenjangan digital dan sosial yang sudah ada. Misalnya, jika akses terhadap teknologi tidak merata, maka kemungkinan terjadinya kesenjangan. Selain itu, perhatian juga harus diberikan pada masalah privasi dan keamanan data, mengingat bahwa teknologi ini akan mengumpulkan jumlah data yang lebih besar dari sebelumnya. Tanpa perlindungan yang cukup, ada risiko penyalahgunaan data dan pelanggaran privasi individu.

Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam memanfaatkan teknologi ini secara etis dan inklusif. Penelitian ini harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil, agar mencakup perspektif yang beragam dan mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi semua pihak. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, Indonesia dapat memanfaatkan potensi besar dari Era *Society 5.0* untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi semua warganya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada FISIPKUM Universitas Serang Raya dan FIKOM Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mendukung kolaborasi dalam penulisan artikel ini.

REFERENSI

- Bryman. (2019). *Social Research Methods*. USA: Oxford University Press.
- Diamond. (2023). *Developing democracy: Toward consolidation*. JHU Press.
- Forum, W. E. (2020). *Bridging the Digital Divide*. Retrieved from World Economic Forum: <https://www.weforum.org/reports/bridging-the-digital-divide>
- Fukuyama. (2018). Society 5.0: Aiming for a New Human-centered Society. *Japan Spotlight*, 47-50.
- Morikawa. (2020). The Role of AI and IoT in Society 5.0. *Journal of Information Processing and Management*, 63(2), 25-30.
- Miyamoto. (2019). Inclusive Innovation in the Era of Society 5.0. *International Journal of Innovation Management*, 23(4), 1950034.
- Nakanishi. (2019). Integrating AI and IoT for Smart Society. *Advanced Robotics*, 32(1), 12-19.
- Nakano. (2019). Society 5.0: Digital Transformation and Its Impacts. *Fujitsu Scientific and Technical Journal*, 55(1), 8-13.
- Rosenstone, S. J., & Hansen, J. M. (2023). *Mobilization, Participation, and Democracy in America*. New York: Longman.
- Surahman, S. (2024). *Ekonomi Politik Media: Dinamika Interaksi Teknologi, Media, dan Kekuasaan Era 5.0*. Yogyakarta: Madani Berkah Abadi.
- Surahman, S. (2024). *Memahami Kajian Media dan Budaya: Pendekatan Multidisipliner*. Jakarta: Kencana Media Prenada.
- Tanaka. (2020). Building an Inclusive Society through Technological Innovation. *Journal of Social Policy and Technology*, 44(2), 112-120.
- Yamaguchi. (2020). Policy Framework for Society 5.0. *Journal of Policy Innovation*, 15(3), 50-57.
- Yin, R. K. (2020). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. London, New York, United Kingdom: Sage Publications.